

Meneropong Efektivitas dan Efisiensi Kabinet Koalisi Merah Putih Terhadap Tata Kelola Pemerintahan

***Sheila Adi Nurmala¹, Candrika Pratisara Hadi²**

¹Universitas Airlangga, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

²Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman, Yogyakarta, Indonesia

*sheila.adi.nurmala-2023@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

This research explores the effectiveness and efficiency of the Red and White Coalition's Fat Cabinet under the leadership of President Prabowo Subianto, and its implications for state governance. Indonesia's presidential system, stipulated in the 1945 Constitution, gives the president the power to form a cabinet consisting of ministers appointed based on political considerations and competence. This research uses a qualitative method with a statutory and conceptual approach to analyze the structure and dynamics of the cabinet. The results show that although a fat cabinet has the potential to improve political stability and task specification, challenges such as inefficiency and coordination difficulties remain. Therefore, it is recommended that the Prabowo administration conduct periodic evaluations of ministry performance and increase transparency in decision-making to ensure policies that favor the public interest.

Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas Serta efisiensi Kabinet Gemuk Koalisi Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, serta implikasinya atas tata kelola negara. Sistem presidensial Indonesia, diregulasi pada UUD 1945, memberikan presiden kekuasaan demi membentuk kabinet terdiri dari kepala kementerian-kepala kementerian diangkat didasarkan pertimbangan politik Serta kompetensi. Penyelidikan ini mempergunakan metode kualitatif dengan pendekatan undang-undang serta konsep demi menganalisis struktur Serta dinamika kabinet. Hasil penyelidikan membuktikan bahwasanya meskipun kabinet gemuk berpotensi meningkatkan stabilitas politik Serta spesifikasi tugas, tantangan seperti inefisiensi Serta kesulitan koordinasi tetap ada. Akibatnya, disarankan agar pemerintahan Prabowo melakukan evaluasi berkala atas kinerja kementerian Serta meningkatkan transparansi pada pengambilan keputusan demi memastikan kebijakan berpihak pada interest publik.

Kata Kunci: *Efektivitas Kabinet, Efisiensi Kabinet, Kabinet Merah Putih.*

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan sistem presidensial ini dengan menyatakan bahwasanya “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan eksekutif menurut UU Dasar.” Oleh karena penyelenggaraan pemerintahan perlu didasarkan kekuasaan, maka pertanggungjawaban Serta akuntabilitas pada hakikatnya melekat pada jabatan pada

penyelenggaraan pemerintahan (Rahman, 2024). Konsep presidensialisme dewasa ini, tampak dikonsepsikan ke pada tiga model, yaitu kuasa presidensial menjadi kuasa eksklusif, kuasa presidensial didasarkan evolusi partai politik Serta electoral vote, Serta kuasa presidensial memainkan kuasa minor semata (Polamolo, 2016):

1. Organisasi negara lain tak punya kekuasaan presidensial, merupakan satu-satunya kewenangan demi administrasi negara. Misalnya, cabang eksekutif khususnya, presiden biasanya punya kekuasaan demi memilih kepala kementerian, menangani urusan internasional, Serta mengendalikan militer.
2. Perkembangan partai politik serta suara elektoral berdampak pada kewenangan presiden. pada situasi ini, presiden mewakili koalisi partai daripada sepenuhnya mencerminkan keinginan rakyat. Selain itu, sistem elektoral juga memengaruhi model ini; beberapa negara menggunakan struktur dimodifikasi di mana pemenang perlu menerima melampaui 50% suara nasional, sementara lain menggunakan metode pemungutan suara mayoritas sederhana.
3. Negara-negara seperti Jerman, Hungaria, serta India adalah contoh utama situasi di mana presiden punya sedikit kewenangan.

Kewenangan dijalankan oleh instansi pemerintahan berlandaskan di asas legalitas serta perlindungan HAM demi menciptakan prinsip *good governance*. Terdapat lima prinsip kepemimpinan beretika dapat dikedepankan demi mewujudkan *good governance*, yaitu: *fairness/adil*, *transparency/terbuka*, *responsibility/tanggung jawab*, *efficiency/efisiensi*, serta *no conflict of interest/tak ada interes individu* (Mulia and Khalill, 2020). *Parameter* dipakai pada penggunaan kewenangan tersebut ialah kepatuhan hukum ataupun ketidaktaatan hukum (*improper illegal*) memaksa tiap badan hukum pemerintah berwenang tersebut perlu mempertanggungjawabkan tiap kewenangan diberikan serta dipergunakan olehnya (Kelbulan et al., 2022).

Salah satu bentuk kewenangan pada sistem presidensial adalah kewenangan Presiden demi membentuk kabinet kementerian. Kementerian Negara sangat penting bagi cabang eksekutif pemerintah karena membantu administrasi pemerintahan. Setelah kemerdekaan Serta pengesahan UUD 1945, kepala kementerian menjabat menjadi penasihat Presiden Serta dipilih serta diberhentikan oleh Presiden. Dengan demikian, Presiden menjadi sasaran pertanggungjawaban kepala kementerian. Presiden punya kewenangan demi memilih komposisi Serta jumlah kementerian negara sejak awal kemerdekaan negara ini. Oleh karena itu, kementerian negara sering kali dibentuk, dimodifikasi, Serta dibubarkan selama periode pemerintahan berbeda dari masa kemerdekaan hingga saat ini, mencerminkan perubahan realitas sosial politik (Madjid, 2022).

penciptaan UU No.38 Tahun 2008 terkait Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) diusulkan menjadi tanggapan kepada kewenangan Presiden demi mengangkat serta memberhentikan kepala kementerian. Persyaratan pengangkatan serta

pemberhentian kepala kementerian diregulasi pada undang-undang ini. Persyaratan pengangkatan kepala kementerian tak dimaksudkan demi membatasi kewenangan Presiden pada memilih kepala kementerian, melainkan demi menegaskan perlunya kepala kementerian diangkat perlu jujur serta bermoral baik. Selain itu, Presiden diharapkan mempertimbangkan pengalaman kepemimpinan, kemampuan bekerja sama dengan orang lain menjadi penasihat Presiden, serta kompetensi berkaitan dengan tugas Kementerian (Riewanto et al., 2023).

Presiden punya kewenangan hukum demi menentukan siapa akan masuk atau keluar dari kabinetnya saat menunjuk anggotanya. Namun, Presiden perlu memastikan bahwasanya penggunaan kewenangan ini tak menguntungkan kelompok tertentu karena norma konstitusi. Presiden perlu berupaya demi memasukkan berbagai aspek mewakili keberagaman masyarakat Indonesia saat menyusun cabinet (Asshiddiqie, 2006).

Namun, sering kali pada praktiknya, pemilihan kepala kementerian lebih didasarkan pada pertimbangan politik, seperti balas budi atas dukungan partai politik pada pemilihan presiden, daripada pada kompetensi Serta integritas calon kepala kementerian. Padahal, secara ideal, seorang kepala kementerian perlu punya kualifikasi tinggi, seperti kemampuan bekerja baik, profesionalisme, Serta integritas kuat. Sayangnya, realitas politik di Indonesia menunjukkan bahwa hal ini belum sepenuhnya terwujud. Pengangkatan kepala kementerian sering kali lebih dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan di luar interes negara, seperti interes partai politik atau kelompok tertentu (Yanto and Nugraha, 2021).

Perihal tersebut setidaknya bisa dilihat dari komposisi kepala kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009) serta Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) dikepalai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selanjutnya Kabinet Kerja (2014-2019), Serta Kabinet Indonesia Maju (2019-2024) dikepalai oleh Presiden Joko Widodo, serta Kabinet Merah Putih (2024-2029) dikepalai oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tabel 1. Kabinet dari berbagai partai politik

No	Nama Kabinet	Latar Belakang kepala kementerian	
		Partai Politik	Non-Partai Politik
1	Kabinet Indonesia Bersatu I	16	21
2	Kabinet Indonesia Bersatu II	16	21
3	Kabinet Indonesia Kerja	16	18
4	Kabinet Indonesia Maju	16	18
5	Kabinet Merah Putih	23	25

Sumber: beberapa website media dikumpulkan Serta diolah oleh penulis

Zaman pemerintahan SBY dari 2004 sampai 2014 diwarnai dengan sengketa hubungan politik antara eksekutif Serta legislatif ditandai dengan beberapa usulan hak interpelasi serta hak angket diajukan oleh DPR, salah satunya kasus hak angket dana talangan Bank Century Serta hak angket pajak. Buntut ketidakharmonisan hubungan ini, salah satunya pencopotan kepala kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada saat itu belum lama dinobatkan menjadi kepala kementerian terbaik Asia versi *Emerging Market* (Ansori, 2023).

Masa-masa terakhir menjelang berakhirnya Pemerintahan Jokowi, terlihat bahwa Jokowi merupakan seorang ambisius pada hal melanggengkan kekuasaannya. Hal ini terlihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi memutus pengurangan batas umur Calon Wakil Presiden, pada hal ini diperuntukkan demi Gibran Rakabuming Raka merupakan anak sulung Jokowi, mana Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu adalah Anwar Usman merupakan saudara Ipar Jokowi. Selain itu keputusan *reshuffle* beberapa kepala kementerian dari PDIP juga seakan Pemerintahan Prabowo menjadi pemerintahan dengan kabinet tergemuk sejak zaman Presiden SBY dengan 48 Kementerian memunculkan pertanyaan, apakah penerapan kabinet gemuk pada kabinet Merah Putih dikepalai oleh Prabowo merupakan keputusan tepat sasaran Serta tepat guna menurut tata kelola negara.

B. METODE

Penyelidikan ini mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta konsep (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilngsungkan dengan mengkaji seluruh UU serta konsep mengenai dengan permasalahan peneliti bahas pada penelitian serta mempelajari terkait keberadaan atau konsistensi serta kesesuaian antara UU dengan konsep hukum ada Serta hasilnya menjadi argumen demi memecahkan permasalahan pada penelitian (Syamsudin, 2007).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabinet, menjadi bagian penting dari cabang Eksekutif, terdiri dari perwakilan pemerintah dipilih oleh Presiden, bertindak menjadi kepala negara. Bergantung pada struktur pemerintahan negara Serta orang bertanggung jawab atas Eksekutif, seperti presiden atau perdana kepala kementerian memimpin Kabinet, kabinet juga dapat disebut dengan nama berbeda, seperti Dewan kepala kementerian, Dewan Eksekutif, atau Komite Eksekutif (Fahlevi and Mustaqim, 2020). Pasal 17 Bab V UUD 1945 terkait Kementerian Negara meregulasi tata cara pengangkatan anggota kabinet. Menurut paragraf pertama, kepala kementerian negara membantu presiden pada melaksanakan tugasnya. Dijelaskan pada baris berikut bahwa Presiden mengangkat Serta memberhentikan kepala kementerian-kepala kementerian ini. Sementara partai politik Serta masyarakat umum memberikan usulan demi dipertimbangkan presiden,

undang-undang ini memberikan presiden kekuasaan politik demi menjalankan hak prerogatif pada membentuk kabinet. Selain itu, sebagaimana dinyatakan pada paragraf 3 Serta 4, tiap kepala kementerian bertanggung jawab atas urusan pemerintahan tertentu, Serta penciptaan, perubahan, serta pembubaran kementerian negara diregulasi oleh UU (Wijaya et al., 2024). Salah satu aspek penting pada analisis kinerja kabinet adalah stabilitas politik dihasilkan oleh struktur Serta susunan kabinet. pada konteks kabinet gemuk, terdiri dari banyak kementerian Serta anggota, stabilitas politik seringkali dianggap lebih terjamin. Hal ini disebabkan oleh representasi lebih luas dari berbagai fraksi politik Serta kelompok interes. Kabinet semacam ini dapat mencerminkan keberagaman pandangan Serta aspirasi, sehingga mengurangi potensi konflik internal sering terjadi pada koalisi sempit. Dengan melibatkan berbagai pihak pada pemerintahan, dukungan politik atas kebijakan pemerintah dapat meningkat, baik di tingkat legislatif maupun di mata masyarakat. Namun demikian, perlu diakui bahwa stabilitas politik ini dapat menjadi rapuh apabila koordinasi antar-kementerian tak berjalan dengan baik.

Selain stabilitas politik, efektivitas kabinet juga ditentukan oleh kemampuan pada pembagian tugas Serta tanggung jawab. Kabinet dengan jumlah kementerian besar punya potensi demi membagi beban kerja secara lebih spesifik. Dengan adanya kementerian menangani tugas-tugas lebih terfokus, diharapkan pelaksanaan kebijakan publik menjadi lebih terarah Serta cepat. Sebagai contoh, kementerian punya mandat jelas dapat lebih optimal pada menjawab kebutuhan masyarakat di sektor tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Namun, pembagian tugas ini juga memerlukan koordinasi baik demi menghindari tumpang tindih peran dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Meskipun kabinet gemuk menawarkan keuntungan pada spesifikasi tugas, tantangan besar muncul adalah sulitnya komunikasi Serta koordinasi antar-departemen. pada struktur terlalu besar, arus informasi seringkali menjadi terhambat, dapat mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan. Kurangnya integrasi data Serta kebijakan antar-kementerian juga dapat menimbulkan inefisiensi, di mana suatu tugas dilakukan secara duplikasi atau kebijakan diambil tak selaras satu sama lain. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya sistem integrasi data andal Serta mekanisme koordinasi tepat sasaran, seperti penguatan peran sekretariat kabinet atau pemanfaatan teknologi informasi demi mempercepat proses kerja antar-kementerian.

Selain itu, kabinet besar juga membawa konsekuensi atas efisiensi biaya operasional. Setiap kementerian membutuhkan anggaran demi mendukung kegiatan sehari-hari, termasuk gaji pejabat, biaya program, serta fasilitas operasional lainnya. Peningkatan jumlah kementerian secara otomatis akan meningkatkan beban anggaran negara. pada situasi ekonomi menantang, hal ini dapat menjadi beban signifikan bagi keuangan negara jika tak diimbangi dengan manfaat nyata bagi masyarakat. Akibatnya, perlu ada pengawasan ketat atas alokasi anggaran serta evaluasi berkelanjutan demi

memastikan bahwa setiap kementerian memberikan kontribusi sepadan atas pencapaian tujuan pembangunan nasional.

didasarkan pasal 15 UU Kementerian Negara, jumlah Kementerian pada satu kabinet Pemerintahan adalah 34 Kementerian Serta pada masa penghujung Pemerintahan Jokowi, pasal tersebut diubah dengan UU No.61 Tahun 2024 Terkait Kementerian Negara, dengan tak membatasi jumlah Kementerian. Hal ini disambut oleh Pemerintahan Prabowo dengan kabinet gemuknya diisi oleh 48 Kementerian demi mewujudkan salah satu visi-misi Prabowo-Gibran adalah menciptakan reformasi birokrasi (Sejati, 2024).

Setidaknya ada 4 (empat) aspek perlu dipertimbangkan oleh membentuk kabinet demi mewujudkan kabinet presidensial tepat sasaran, yaitu (Zaman, 2020):

1. aspek politik menjadi krusial, terutama pada sistem koalisi. Calon kepala kementerian perlu dapat diterima oleh semua partai koalisi agar tercipta stabilitas pemerintahan Serta menghindari perpecahan dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan.
2. aspek strategis menitikberatkan pada kemampuan manajerial Serta kepemimpinan calon kepala kementerian. Seorang kepala kementerian perlu mampu menerjemahkan visi Presiden menjadi program nyata Serta menjalankan pemerintahan baik dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab, efisiensi, Serta bebas dari konflik interest.
3. aspek teknokratik menyoroti pentingnya kompetensi Serta integritas. Seorang kepala kementerian tak hanya perlu punya keahlian di bidangnya, tetapi juga punya integritas kuat demi menjalankan tugasnya dengan bersih Serta bertanggung jawab.
4. aspek publik menekankan pentingnya mempertimbangkan aspirasi rakyat pada penciptaan kabinet. Presiden terpilih adalah representasi dari rakyat, sehingga suara rakyat perlu didengar pada menentukan komposisi kabinet diharapkan dapat memenuhi harapan Serta kebutuhan masyarakat.

Dari aspek Politik, Prabowo punya maksud mewujudkan kabinet kolaborasi pada kepemimpinannya dengan menggandeng berbagai macam pihak ke pada kabinetnya, di antaranya mantan kepala kementerian era Jokowi, para Teknokrat, partai oposisi (Suhardi, 2024), Serta pengusaha (Rahmanda, 2024). Dari segi strategis Serta Teknokratik, Kabinet Prabowo punya total 22 kepala kementerian dengan latar belakang profesional Serta organisasi kemasyarakatan, ditambah dengan 5 badan setingkat kepala kementerian semuanya diisi oleh professional (Revo, 2024). Dari aspek publik, Prabowo melantik Raffi Ahmad serta Gus Miftah menjadi utusan khusus Presiden (lembaga setingkat kepala kementerian) (Lestari, 2024).

Perihal ini membuktikan bahwasanya Prabowo teguh pada tekadnya demi membentuk Kabinet kooperatif, akan bekerja demi memajukan kebajikan,

meningkatkan kesejahteraan, menciptakan kekayaan, mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, serta memerangi korupsi di Indonesia (Jingga, 2024).

Presiden punya kekuasaan sangat kuat pada membentuk kabinet. Hal ini dikarenakan posisinya kokoh pada konstitusi Serta didukung oleh sistem politik dirancang sedemikian rupa. Dengan dukungan parlemen cukup, Presiden punya keleluasaan demi memilih siapa saja akan menjadi kepala kementerian. Meski begitu, pada praktiknya, komposisi kabinet sering kali berupa kombinasi antara para profesional Serta perwakilan partai politik. Namun, jumlah kepala kementerian dari partai politik biasanya tak melebihi jumlah kepala kementerian profesional. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden berusaha demi menyeimbangkan interes politik Serta interes profesionalisme pada membentuk kabinet. Yang menarik adalah, semua kepala kementerian, baik dari partai politik maupun kalangan profesional, dituntut demi loyal sepenuhnya kepada Presiden. Artinya, tak ada konflik interes berarti antara loyalitas partai Serta loyalitas kepada negara diwakili oleh Presiden (Yuda AR, 2013).

Kelemahan hal ini dapat ditelusuri sejak kepemimpinan SBY pada periode pertama seakan tersandera oleh partai politik. Hal tersebut disebabkan oleh SBY tak dapat mengelak desakan-desakan parpol pendukungnya menyodorkan kader-kader mereka demi mendapat jatah pada cabinet (Mahfud MD, 2009). Hal tersebut juga dapat dilihat pada kepemimpinan Prabowo dengan memboyong mayoritas kepala kementerian parpol dari partai pengusungnya Serta kepala kementerian ex pemerintahan Jokowi sensasional seperti Dito Ariotedjo, Budi Arie Setiadi, Erick Thohir Serta Bahlil Lahadalia. Selain itu, Prabowo juga turut mengajak orang-orang terdekatnya pada badan-badan setingkat kepala kementerian, seperti Teddy Indra Wijaya (mantan ajudan Prabowo), Raffi Ahmad Serta Gus Miftah (keduanya aktif mendukung Prabowo pada pilpres).

Terdapat pro-kontra dari para pakar terkait kabinet gemuk Prabowo, karena jumlah kabinet besar dapat memberikan keuntungan seperti pembagian tugas lebih spesifik (Rohman, 2024), Serta stabilitas politik (Hutajulu, 2024), serta kerugian, seperti sulitnya koordinasi (Avisena, 2024), Serta peningkatan anggaran (Sahal, 2024). Meskipun demikian langkah Prabowo patut diapresiasi, mengingat hal ini merupakan suatu gebrakan baru pada sejarah pemerintahan Indonesia, namun Prabowo juga perlu melakukan evaluasi atas keputusan ini, apakah benar-benar suatu kebutuhan bagi Negara atau sekadar keinginan impulsif.

Kabinet Gemuk Koalisi Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto memunculkan berbagai evaluasi terkait efektivitasnya pada menjalankan pemerintahan. Salah satu tantangan terbesar dari struktur kabinet besar adalah memastikan efisiensi, terutama pada mencegah tumpang tindih tugas Serta wewenang antar-kementerian. Untuk itu, diperlukan sistem koordinasi terintegrasi, seperti penerapan teknologi manajemen proyek Serta pengawasan kinerja berbasis data. Kabinet kolaborasi ini, mengakomodasi berbagai interes politik, teknokrat, Serta tokoh masyarakat, diharapkan

dapat menjaga stabilitas politik. Namun, Presiden perlu memastikan profesionalisme tetap menjadi prioritas, sehingga interes politik tak mengorbankan interes publik. Selain itu, struktur kabinet besar memerlukan alokasi anggaran lebih tinggi, berpotensi memengaruhi sektor strategis lainnya seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Akibatnya, evaluasi berkala atas kontribusi setiap kementerian menjadi penting demi memastikan efektivitas Serta efisiensi penggunaan anggaran.

Partisipasi Serta pengawasan publik juga menjadi aspek perlu diperhatikan. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi kinerja kabinet dengan menyediakan laporan berkala dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan publik memberikan masukan konstruktif sekaligus memastikan adanya check and balance lewat peran media massa serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Untuk mendukung kinerja kabinet optimal, Presiden perlu memperkuat sistem monitoring Serta evaluasi berbasis indikator kinerja utama serta memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan terarah, khususnya pada pengurangan prosedur administratif berbelit, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), Serta adopsi teknologi digital. Evaluasi juga perlu dilakukan demi mengidentifikasi redundansi atau tumpang tindih fungsi antar-kementerian, sehingga konsolidasi dapat menjadi opsi demi meningkatkan efektivitas koordinasi.

Presiden perlu memastikan bahwa setiap kementerian tetap berorientasi pada prioritas nasional, seperti pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, Serta pelayanan kesehatan. Dengan sinergi antar-kementerian terjaga, kabinet ini punya peluang demi menciptakan terobosan pada pemerintahan Indonesia. Meskipun langkah Prabowo membentuk kabinet gemuk ini merupakan gebrakan berani, evaluasi terus-menerus Serta koreksi kebijakan tetap menjadi kunci agar struktur kabinet besar ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi bangsa, bukan justru menjadi beban tambahan bagi negara.

D. SIMPULAN

Kabinet Gemuk Koalisi Merah Putih dikepalai oleh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan potensi signifikan pada meningkatkan stabilitas politik Serta spesifikasi tugas pada pemerintahan. Dengan jumlah kementerian mencapai 48, kabinet ini mencerminkan keberagaman politik Serta aspirasi masyarakat, dapat mengurangi risiko konflik internal Serta meningkatkan dukungan atas kebijakan pemerintah. Namun, tantangan besar seperti inefisiensi, kesulitan koordinasi, Serta peningkatan anggaran tetap menjadi perhatian utama. Koordinasi buruk antar-kementerian dapat menghambat pengambilan keputusan Serta pelaksanaan kebijakan, sehingga diperlukan sistem integrasi data Serta mekanisme komunikasi lebih tepat sasaran demi memastikan sinergi pada kerja kabinet. Selain itu, pengawasan ketat atas alokasi anggaran sangat penting demi memastikan bahwa setiap kementerian memberikan kontribusi sepadan dengan biaya operasional dikeluarkan. Akibatnya, disarankan agar pemerintahan

Prabowo melakukan evaluasi berkala atas kinerja kementerian Serta meningkatkan transparansi pada pengambilan keputusan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabinet Gemuk dapat berfungsi secara lebih tepat sasaran Serta tepat guna, serta memenuhi harapan masyarakat pada tata kelola pemerintahan baik.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ansori, Lutfil. "penciptaan Kabinet Koalisi pada Sistem Presidensial Multi Partai Di Indonesia." *Al-Daulah* 12, no. 2 (2023). https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/42086.
- AR, Hanta Yuda. *Presidensialisme Setengah Hati*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengenalan Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Serta Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Fahlevi, Reja, and Darul Huda Mustaqim. "Kolaborasi Kabinet Zaken Serta Kabinet Koalisi pada penciptaan Kabinet tepat sasaran." *Mimbar Demokrasi* 19, no. 2 (2020). <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/view/14939>.
- Kelbulan, Jacoba F X, Saartje Sarah Alfons, and Hendry John Piris. "Wewenang Prerogatif Presiden pada Pengangkatan kepala kementerian." *Tatohi* 2, no. 7 (2022). <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/1134>.
- Madjid, Mario Agritama S W. "Politik Hukum Pembatasan Wewenang Prerogatif Presiden pada penciptaan Kementerian didasarkan UU Kementerian Negara." *Constitutional Journal* 1, no. 2 (2022). <https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/view/31/17>.
- MD, Mahfud. *Konstitusi Serta Hukum pada Kontroversi Isu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mulia, Muji, and Zakki Fuad Khalill. *Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Syariah Di Aceh*. Cetakan Pertama. Aceh: Sahifah, 2020.
- Polamolo, Susanto. "Presidensialisme Di Indonesia Antara Amanah Konstitusi Serta Kuasa Partai." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1325>.
- Rahman, Mohammad Haris Taufiqur. "Batas Kekuasaan Presiden pada Konstitusi Indonesia." *Constitutional Journal* 3, no. 1 (2024). <https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/view/101>.
- Riewanto, Agus, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Isnawati, and Jamaludin Ghafur. *Hukum Tata Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Sejati, Sidiq Budi. "Menilik Arah Reformasi Birokrasi Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran." *Info ringkas: Kajian ringkas atas Isu Aktual Serta Strategis* 16, no. 19 (2024). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_ringkas/Info%20Singkat-XVI-19-I-P3DI-Oktober-2024-2081.pdf.

- Syamsudin, M. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Wijaya, Mendra, Rusli Isa, Dyah Mieta Setyawati, and Syahril Ramadhan. Ilmu Pemerintahan: Inovasi pada Tata Kelola Pemerintahan. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Yanto, Andri, and Harry Setya Nugraha. "Redesain Pengisian kepala kementerian pada Sistem Presidensial Di Indonesia." *Progresif: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2021). <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/2508>.
- Zaman, Ali Noer. "Kemunculan Jokowi Di Kontestasi Politik Nasional." *KAIS: Kajian Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/view/6292>.
- <https://www.metrotvnews.com/read/bmRCeMq5-stabilitas-politik-kabinet-prabowo>, diakses pada 2 Desember 2024.
- <https://www.tempo.co/politik/kabinet-merah-putih-prabowo-didominasi-pengusaha-begini-kata-pengamat-Serta-akademisi-973097>, diakses pada 2 Desember.
- <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241024095045-128-582636/terbaru-ini-komposisi-kabinet-merah-putih-prabowo-50-profesional>, diakses pada 2 Desember.
- <https://www.bisnis.com/read/20241023/638/1809927/jadi-pejabat-di-kabinet-prabowo-gaji-raffi-ahmad-Serta-gus-miftah-setara-dengan-kepala-kementerian>, diakses pada 2 Desember.
- <https://nu.or.id/nasional/pro-kontra-pakar-soal-gemuknya-kabinet-merah-putih-anggaran-bisa-membengkak-tapi-bekerja-lebih-spesifik-9D0Ig?form=MG0AV3>, diakses pada 2 Desember.
- <https://news.detik.com/berita/d-7606984/pakar-kabinet-prabowo-seimbang-antara-interes-partai-Serta-teknokratik>, diakses pada 2 Desember.
- <https://mediaindonesia.com/politik-Serta-hukum/711271/kabinet-gemuk-prabowo-bakal-munculkan-persoalan-baru?form=MG0AV3>, diakses pada 2 Desember.
- <https://www.um-surabaya.ac.id/article/soal-kabinet-gemuk-pemerintahan-prabowo-gibran-ini-kata-pakar-um-surabaya>, diakses pada 2 Desember.